

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan memang menjadi sebuah permasalahan perekonomian yang sulit dihilangkan hampir disetiap Negara, terlebih lagi di Negara berkembang seperti Indonesia dimana masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa Negara disekitarnya.<sup>1</sup> Keterbelakangan dan kemiskinan kebanyakan menimpa masyarakat di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat pedesaan yang cenderung masih berlatar belakang dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sumber daya modal yang terbatas, lapangan pekerjaan yang masih sedikit dan sarana infrastruktur pedesaan yang kurang memadai sehingga bisa menghambat jalannya roda perekonomian di pedesaan.<sup>2</sup>

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan merupakan salah satu strategi yang dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam program. Akan tetapi, cara tersebut belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Salah satu faktor yang dominan adalah campur tangan pemerintah yang cenderung menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam mengelola dan mengoperasikan mesin ekonomi pedesaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pendekatan yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat desa, melalui Badan Usaha Milik

---

<sup>1</sup> Lailatul Khasanah “Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia,” *Bharanomics* 1, No. 2 (2021): 75, [Http://Journal.Febubhara-Sby.Org/Bharanomics/Article/View/156/156](http://Journal.Febubhara-Sby.Org/Bharanomics/Article/View/156/156).

<sup>2</sup> Ni Luh Yeni Wulantari, Tungga Atmadja Anantawikrama dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati “Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Melalui Sanksi Adat Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah,” e-journal Universitas Pendidikan Ganesha (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) 1, no. 1 (2017), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/artic le/download/13257/8339>.

<sup>3</sup> Deni Prasetyo “Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018,” *Jom Fisip* 7 (2020): 5, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29285/28218>.

Desa (BUMDes).<sup>4</sup>Pada hakikatnya, BUMDes bukan merupakan suatu hal yang baru. BUMDes sudah ada dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Didalam Pasal 1 angka 6 UU Desa yang berbunyi : “Badan Usaha Milik Desa,yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>5</sup> BUMDes berfungsi sebagai platform untuk usaha desa, mempromosikan otonomi, persatuan, dan upaya kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sumber daya lokal untuk menawarkan layanan yang berorientasi pada masyarakat, meningkatkan status ekonomi desa dan masyarakat. Selain itu, BUMDes berupaya membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya merupakan salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Pati, yang bertempat di Desa Kertomulyo. Pembentukan BUMDes Mekar Mulya dilatar belakangi oleh musyawarah desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2013,Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang di beri nama BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo, sebagai salah satu lembaga ekonomi mikro.

Tujuan didirikannya BUMDes Mekar Mulya tersebut, diharapkan kedepannya mampu menguatkan perekonomian desa, mensejahterakan masyarakat serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kertomulyo. Diantara unit –unit usaha yang dimiliki BUMDes Mekar Mulya, salah satunya pada unit pinjaman meliputi:

---

<sup>4</sup> Ahmadi, Edi Mulyanto dan Achmad “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo,” Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam 3, no. 1 (2022): 46, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1779>.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia,”6 Tahun 2014,Desa,”(15 Januari 2014) [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/Uu/UU\\_2014\\_6.Pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/Uu/UU_2014_6.Pdf) .

<sup>6</sup> Rojaul Huda And Bambang Laksmono “Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Bumdes Serang Makmur Sejahtera , Desa Serang , Kabupaten Purbalingga ,)” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 21, No. 2 (2020): 119, [Http://jurnalkesos.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jiks/Article/View/259](http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/259).

1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), yang bergerak pada sektor simpan pinjam yang sasarannya ditujukan kepada orang tua yang masih memiliki anak sekolah.
2. Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU), unit ini bergerak pada sektor kegiatan simpan pinjam yang sasarannya ditujukan kepada warga Desa Kertomulyo yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan mempunyai usaha.
3. Unit Usaha Pasar Desa (UPD), yang bergerak di kegiatan pinjaman yang sasarannya ditujukan kepada para pedagang pasar Desa Kertomulyo.

Pemberian Kredit yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya kepada masyarakat Desa Kertomulyo berupa pinjaman tanpa jaminan akan tetapi menggunakan bunga.<sup>7</sup> Kredit tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.<sup>8</sup>

Kredit tanpa agunan dapat digunakan untuk tujuan konsumtif misalnya untuk membayar biaya pendidikan anak, biaya renovasi rumah dan kebutuhan pribadi lainnya. Di samping itu, kredit tanpa agunan juga difungsikan sebagai tujuan produktif seperti membiayai kebutuhan modal kerja.<sup>9</sup> Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar risiko sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.<sup>10</sup> Pemberian pinjaman yang

---

<sup>7</sup> Lathifah Hanim, Wawancara Oleh Penulis, 8 Maret ,2023, Wawancara 2,Transkrip.

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Agil, Moh Safik, and Ach Fauzi Lutfi, “Analisis Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 2, no. 2 (2022): 210, <http://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/293>.

<sup>9</sup> Fitri Mulyani, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri,Tbk,” *Universitas Gunadarma* 15 (2021): 52, <https://Ejournal.Gunadarma.Ac.Id/Index.Php/Ugjournal/Article/Download/4622/2262&Ved=2ahukewj0xke0md73ahuotwwghrdjbi0qfnoecbyqq&Usg=Aovvaw2utazuokpy1pcspuihrk>.

<sup>10</sup> Agustina Ni made Ayu Darma Pratiwi and Duwi Aprianti, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan,”

dilakukan BUMDes Mekar Mulya tanpa adanya jaminan dan menggunakan bunga menimbulkan BUMDes memiliki jumlah kredit bermasalah pada Unit Simpan Pinjam (UED SP), Unit Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU), dan Unit Usaha Pasar Desa (UPD). Berikut kredit bermasalah pada Unit Simpan Pinjam pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kredit Bermasalah pada Unit Simpan Pinjam BUMDes Mekar Mulya Tahun 2019-2021**

Tahun	Unit Simpan Pinjam	Jumlah Nasabah	Kredit Yang Disalurkan	Kredit Bermasalah
2019	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)	44	Rp 50.900.000	Rp 38.090.000
	Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU)	41	Rp 44.534.000	Rp 31.060.000
	Usaha Pasar Desa (UPD)	42	Rp 105.000.000	Rp 52.976.000
2020	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)	45	Rp 53.900.000	Rp 40.490.000
	Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU)	39	Rp 52.624.000	Rp 33.760.000
	Usaha Pasar Desa (UPD)	40	Rp 100.000.000	Rp 44.860.000
2021	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)	43	Rp 52.900.000	Rp 37.840.000

	Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU)	36	Rp 48.424.000	Rp 30.710.000
	Usaha Pasar Desa (UPD)	40	Rp 100.000.000	Rp 49.332.000

(Sumber : Dokumen LPJ BUMdes Mekar Mulya Tahun 2021)

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah kredit bermasalah di tahun 2019 pada Unit Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) senilai Rp 38.090.000, dengan jumlah nasabah sebanyak 44 dan total kredit yang didistribusikan senilai Rp 50.900.000. Pada Unit Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU) jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 31.060.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 41 dan total kredit yang diberikan senilai Rp 44.534.000. Kemudian pada Unit Usaha Pasar Desa (UPD) memiliki jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 52.976.000, dengan jumlah nasabah sebanyak 42 nasabah dan total penyaluran pinjaman senilai Rp 105.000.000<sup>11</sup>

Ditahun 2020, jumlah kredit bermasalah pada Unit Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah 45 orang dengan total nominal sebesar Rp 40.490.000 sehingga jumlah kredit yang disalurkan juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp 53.900.000. Kemudian pada Unit Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU) jumlah nasabah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total 39 orang ,akan tetapi jumlah kredit bermasalah mengalami kenaikan sebesar Rp 33.760.000 dan jumlah kredit yang disalurkan juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp 52.624.000. Sedangkan pada Unit Usaha Pasar Desa (UPD) jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 40 orang dengan total nominal sebesar Rp. 44.860.000 sehingga jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 100.000.000<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bumdes Mekar Mulya, "LPJ Bumdes 2019" (Kertomulyo, Trangkil, Pati: Bumdes Mekar Mulya, 2019).

<sup>12</sup> Bumdes Mekar Mulya, "LPJ Bumdes 2020" (Kertomulyo, Trangkil, Pati: Bumdes Mekar Mulya, 2020).

Pada tahun 2021, jumlah kredit bermasalah berada di Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah 43 orang dengan total nominal sebesar Rp 37.840.000 sehingga jumlah kredit yang disalurkan hanya sebesar Rp 52.900.000. Kemudian pada Unit Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU) jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 30.710.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 36 nasabah dan penyaluran pinjaman senilai Rp 48.424.000. Pada Unit Usaha Pasar Desa (UPD) jumlah kredit bermasalah mengalami kenaikan sebesar Rp 49.332.000 dengan total nasabah 40 dan kredit yang disalurkan sebesar Rp 100.000.000<sup>13</sup> Dalam pemberian kredit, tidak dipungkiri bahwa selalu ditemukan adanya permasalahan kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dimana debitur tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada BUMDes Mekar Mulya. Faktor internal yang menimbulkan adanya kemacetan kredit pada BUMDes Mekar Mulya disebabkan karena pengurus masih kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah dan memiliki keyakinan terlalu besar kepada calon nasabah untuk bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet pada BUMDes Mekar Mulya disebabkan karena pertama kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pinjaman, kedua ketidak lancaran usaha dari nasabah dan yang ketiga menurunnya pendapatan ekonomi yang disebabkan nasabah mengalami gagal panen sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar pinjaman, akhirnya terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman atau terjadi penunggakan yang semakin besar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bumdes Mekar Mulya “LPJ Bumdes 2021” (Kertomulyo, Trangkil, Pati: Bumdes Mekar Mulya, 2021).

<sup>14</sup> Niniek Wahyuni, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 12.

<sup>15</sup> Ngatawi, Wawancara Oleh Penulis, 9 Maret, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diorientasikan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa.<sup>16</sup> Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa.<sup>17</sup> Peningkatan tata kelola BUMDes dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan inisiatif berbasis masyarakat dan partisipasi aktif. Dengan menumbuhkan budaya inisiatif dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan BUMDes, organisasi ini dapat mencapai efisiensi dan kinerja operasional yang optimal.<sup>18</sup> Pada tahun 2021 kinerja BUMDes Mekar Mulya telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh program kerja yang sudah terwujud dan berjalan sebagaimana mestinya. Bukti dari perkembangan BUMDes ini terlihat dari bertambahnya modal sektor usaha pada BUMDes Mekar Mulya yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kenaikan Modal Pada Unit Usaha BUMDes Mekar Mulya Tahun 2019-2021**

Unit Usaha	2019	2020	2021
UIKRT	Rp 66.111.025	Rp 71.502.131	Rp 121.805.881
UEDSP	Rp 77.654.825	Rp 77.773.975	Rp 78.073.975
UPD	Rp 39.371.250	Rp 48.301.250	Rp 49.460.250
UPPU	Rp 38.765.800	Rp 38.978.300	Rp 39.179.000

(Sumber : Dokumen LPJ BUMdes Mekar Mulya Tahun 2019, 2020, dan 2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik UIKRT, UEDSP, UPD, maupun UPPU memiliki pertambahan modal yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Maka bisa dikatakan bahwa

<sup>16</sup> Dodi Faedlulloh “BUMDes Dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris,” *Journal of Governance* 3, no. 1 (2018): 2, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/download/3035/2556>.

<sup>17</sup> Reza M. Zulkarnaen “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta,” *Dharmakarya* 5, no. 1 (2017): 1, <http://journal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/11430/5226>.

<sup>18</sup> Suranto dan Florentinus Nugro Hardianto “Model Konseptual Hubungan Modal Sosial Dan Kinerja BUMDes,” *Management Dynamic Conference 5 (MADIC)* 5 (2019): 214, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/download/3035/2556>.

kinerja BUMDes Mekar Mulya memiliki perkembangan yang baik. Unit usaha pada BUMDes Mekar Mulya yang menjadi andalan yakni unit usaha simpan pinjam atau kredit yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat Desa Kertomulyo dalam kegiatan ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Dalam pemberian kredit sangat penting untuk memiliki mekanisme verifikasi kredit internal yang bertujuan untuk memverifikasi ketepatan dalam menyalurkan dana pinjaman dan menegakkan manajemen aset sekaligus mempromosikan efektivitas dalam mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh manajemen. Pinjaman yang diberikan harus hati-hati agar terhindar dari kredit yang tidak menguntungkan.<sup>19</sup> Sehingga dalam BUMDes perlu adanya pengendalian internal agar terhindar dari segala bentuk risiko dan penyelewengan yang terjadi. Sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi agar kedepannya dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang baik.<sup>20</sup> Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan menunjang keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mencerminkan praktik manajerial yang baik juga.<sup>21</sup> Sistem pengendalian internal dalam memberikan kredit yang ada di BUMDes Mekar Mulya memiliki kendala dalam praktiknya yang disebabkan oleh kurang kehati-hatian dan ketelitian dari pegawai dalam menganalisa calon nasabah dan sikap terlalu percaya kepada

---

<sup>19</sup> Jumaiyah dan Aulia Fanandia Mawardiani “Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ),” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17, no. 2 (2017): 76, <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/download/10889/8396/23105>.

<sup>20</sup> Candra Restalini Anandya and Desak Nyoman Sri Werastuti, “Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 186, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/25933>.

<sup>21</sup> Andi Nurwinda dan Ahmad Jibrail “Analisis Sistem Penegendalian Internal Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (Bumdes Lkm) Desa Leseng,” *Journal Of Accounting, Finance And Auditing* 2, No. 2 (2020): 67–68.



nasabah dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu sehingga hal ini menyebabkan adanya kredit bermasalah pada unit simpan pinjam.<sup>22</sup>

BUMDes Mekar Mulya dan BUMDes Mekar Mulya telah menjalin komitmen bersama untuk membantu BUMDes Mekar Mulya dalam menyelesaikan masalah kredit macet dengan menetapkan norma-norma yang mengikat secara hukum yang membuat klien takut dengan aturan yang telah disepakati bersama. BUMDes Mekar Mulya melakukan penyelesaian masalah kredit macet dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan kepada konsumen untuk mendapatkan jawaban penyelesaian kredit bermasalah sehingga baik BUMDes maupun nasabah tidak terpengaruh. Langkah ini dilakukan untuk menghindari munculnya masalah baru antara BUMDes dan pelanggan serta untuk menjaga hubungan persaudaraan dengan baik.

Adanya research gap juga , yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu berdasarkan pada riset-riset terdahulu yang lebih mengangkat pada permasalahan pengelolaan pada BUMDes seperti penelitian yang dilakukan oleh Herry Gunawan, Sofyan Muhlisin, Gunawan Ikhtiono pada tahun 2022 mengenai *Analisis Pengelolaan BUMDes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah; Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor* . Kemudian sistem pengendalian internal dalam rangka menanggulangi terjadinya kredit macet yang ada di BUMDes seperti penelitian yang dilakukan oleh Puspita Meilasari, Choifuddin Muchlis dan Rima Purwanti pada tahun 2020 mengenai *Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kredit Macet BUMDes*.

Selanjutnya penyelesaian kredit macet BUMDes dengan menggunakan peran sanksi adat seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadek Rina Marlina dan Ni Wayan Yulianita Dewi pada tahun 2021 mengenai *Mengungkap Peran Sanksi Adat untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa*. Dan yang terakhir penyelesaian kredit bermasalah dengan sistem tanggung renteng seperti penelitian yang dilakukan oleh Syntia Ayu Mardiana yang berjudul *Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milk Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung*

---

<sup>22</sup> Ngatawi, Wawancara Oleh Penulis, 9 Maret, 2023, Wawancara 1,Transkip.

Dari penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Penelitian terdahulu menggunakan cara pemberian sanksi layanan adat dalam menyelesaikan masalah kredit macet dan penyelesaian kredit macet BUMDes menggunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penyelesaian kredit macet BUMDes dengan cara pendekatan kekeluargaan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan. Atas hal tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Sistem Pengendalian Internal Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pendekatan Kekeluargaan Pada BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”**. Penelitian ini, nantinya akan ditekankan pada pengendalian internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan pendekatan kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam BUMDes Mekar Mulya.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada seberapa baiknya penerapan sistem pengendalian internal dalam memberikan kredit di BUMDes Mekar Mulya dan efektifitas dari pendekatan kekeluargaan dalam mengatasi kredit bermasalah pada Unit Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), Usaha Pengelola dan Pengembangan Usaha (UPPU) dan Usaha Pasar Desa (UPD) BUMDes Mekar Mulya. Fokus penelitian ini berpusat di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang yang mejadi pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dengan ini penulis memberikan masalah yang telah dirumuskan dibawah:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Badan Usaha Milik Desa Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana Efektifitas Penerapan Pendekatan Kekeluargaan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Badan Usaha Milik Desa Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Penerapan Pendekatan Kekeluargaan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini dapat mendorong pengembangan pengetahuan tentang “Sistem Pengendalian Internal dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pendekatan Kekeluargaan Pada BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Guna memperoleh suatu pengetahuan yang lebih tajam terkait Sistem Pengendalian Internal dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pendekatan Kekeluargaan Pada BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

###### **b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi koreksi agar meningkatkan kinerja BUMDes Mekar Mulya agar dapat menjadi lebih baik lagi.

###### **c. Bagi Institusi**

Sebagai tambahan referensi kepustakaan almamater IAIN Kudus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menjabarkan sistematika tulisan ini supaya dapat dengan mudah dipahami, dibawah ini penjabarannya:

a. Bagian Muka

Berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, halaman abstraksi, halaman daftar tabel dan daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

b. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi:

Bab I : Pendahuluan, memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan teori, memuat tentang: sistem pengendalian internal, penyelesaian kredit bermasalah, BUMDes, hasil penelitian tumpang yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode penelitian, memuat tentang: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokus penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian terkait penggambaran dari objek penelitian deskriptif data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang sifatnya membangun serta untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi, dan penutup.

c. Bagian Akhir :

Terdiri dari daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian sebagai rujukan didalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.